



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN KALIMANTAN
(UIP3B KAL)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL SALAM NGANRO**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **203112**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.613.364.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.013.364.000
3. Tanah Seluas 4500 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 600.000.000**

1. MOBIL, MAZDA 2 1.5L A/T GT SKY ACTIV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV 1,5 TURBO PRESTIGE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 240.298.040****D. SURAT BERTHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 923.088.823****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 163.299.720****Sub Total** **Rp. 3.540.050.583****III. HUTANG** **Rp. 73.130.498****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 3.466.920.085****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.